

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku:

- Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta : UII press.
- Aditia Syafirillah. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Budi Utama. Yogyakarta.
- Adrian Sutedi*, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar. Grafika, Jakarta.
- Basah Sjachran. 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Surabaya.
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indoensia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT rajagrafindo persada Jakarta.
- E. Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta.
- Salim HS. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soesilo, KUHP dan KUHP, cetakan 1, Buana Press, 2008.

Jurnal-jurnal:

- Yunianto, “Kajian Problema Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 5, No 3 (2009).
- Budi Gutami, Muhamad Azhar, “Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2 (2017).
- Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Sekala Kecil” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 5, No 3 (2016).
- Erman, “Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka”, *Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Vol 36, No 2 (2010).

- Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3, No 1 (2017).
- Febri Pirwanda, Budi H. pirngadie, "Dampak Kegiatan Tambang Timah Inkonvensional Terhadap Perubahan Guna Lahan di Kabupaten Belitung", *Jurnal Planologi UNPAS Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota*, Vol 2, No 3 (2015).
- Puluhulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman*, Vol 11, No 2 (2011).
- Kartono, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal Dinamika Hukum Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman*, Vol 9, No 3 (2009).
- Rahayu, "Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasarkan Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 41, No 4 (2012).
- Murty, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Hukum Simbur Cahaya*, Vol 24, No 1 (2017).
- Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 6, No 2 (2015).
- Toni jaya, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Kibat *Illegal Meaning* di Kabupaten Ketapang", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 2, No 3 (2013).

Peraturan Perundang Undangan:

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Website:

<http://www.gultomlawconsultants.com/sejarah-hukum-pertambangan-di-indonesia/#>

[Badan pusat statistik bangka barat, https://bangkabaratkab.bps.go.id/](https://bangkabaratkab.bps.go.id/)

<http://www.transformasi.net/articles/read/140/izin-usaha-pertambangan.html>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl57841/parent/28851>